



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Payung Hukum Pusat Keuangan Global Dikebut
Tanggal : Jumat, 03 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 11

REGULASI

Payung Hukum Pusat Keuangan Global Dikebut

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR mengesahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia dengan target pengesahan bulan ini. Percepatan pembahasan bidang strategi tersebut menuntut analisis cepat terhadap risiko investasi, dan diadopsi di industri keuangan domestik.

Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026) merevisi usulan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFI I) menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Hal ini menunjukkan pemerintah akan mempercepat pembahasan terkait payung hukum yang digadang-gadang menjadi fondasi hukum nasional Indonesia membangun pusat keuangan internasional.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhita Sadewa, pembentukan PFI merupakan bagian dari transformasi sektor keuangan nasional sekaligus amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Pusat-pusat keuangan internasional telah menjadi instrumen penting bagi banyak negara untuk menarik investasi, memperlakukan risiko investasi, dan mendorong inovasi sektor keuangan. Indonesia memiliki modal kuat untuk mengubah peran lebih besar dalam ekosistem keuangan global. "Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat aktivitas keuangan internasional di kawasan Asia dan dunia," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/7/2026).

Ini juga melihat Indonesia memiliki fondasi kuat berupa besarnya perekonomian nasional, basis pasar domestik, posisi geografis strategis, kekayaan sumber daya alam, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Namun, Indonesia belum memiliki kawasan finansial internasional yang dirancang secara khusus dengan standar tata kelola, regulasi, infrastruktur, dan daya tarik untuk pusat keuangan global seperti Singapura, ULA, dan Hong Kong.

Pembentukan, mengesahkan PFI sebagai wilayah khusus di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan ambisi keuangan nasional untuk menarik investasi, usaha perantara jasa keuangan, dan aktivitas ekonomi lain yang menopang ekosistem pusat keuangan internasional.

Dalam batas-batas tertentu, PFI ditunjukkan untuk mengadopsi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip-prinsip hukum komersial internasional dan standar internasional yang telah terbukti memberikan efisiensi dan kepastian dalam aktivitas bisnis global," ujar Purbaya.

PFI lanjut Purbaya, dirancang menjadi katalis bagi pertumbuhan sektor keuangan nasional, pengembangan inovasi jasa keuangan, penguatan investasi, serta pembiayaan proyek-proyek strategis nasional dan sektor prioritas. Pemerintah juga berharap PFI dapat memperkuat pembangunan berkolaborasi dan meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rancangan bidang tersebut, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas untuk menarik investor global, mulai dari kemudahan perizinan, fasilitas keuangannya, pendanaan, ketenagakerjaan, hingga insentif perpajakan. Pemerintah juga menggunakan pengalaman khusus PFI yang berkembang mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan usaha di kawasan itu, termasuk sebagai kawasan komersial internasional.

Urgensi beleid

Ketua Komisi XI DPR Mukhlisat Mubandah menuliskan, pembahasan tingkat I di Komisi XI ditargetkan rampung pada 20 Juli 2026. Setelah selesai, PFI I akan diadopsi ke rapat paripurna untuk pengesahan keputusan tingkat II. Percepatan pembahasan tak terduga karena Komisi DPR hanya memiliki waktu efektif sekitar 20 hari sebelum masa sidang berakhir pada 22 Juli.

Sebelum rapat pembahasan, Komisi XI juga membentuk panitia kerja untuk mempersiapkan pembahasan DPR mengenai proses legislasi tetap melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan terkait. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Martin Manurung meng-

atakan, pemerintah membentuk PFI menjadi instrumen untuk memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional sekaligus memperdalam sektor keuangan nasional.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, pemerintah yang dapat dituntaskan melalui PFI sangat besar. Sebagai contoh, realisasi investasi Indonesia saat ini sekitar Rp 22,6 miliar per tahun, sedangkan pusat keuangan seperti Singapura mampu menarik arus modal hingga Rp 500 miliar.

Modal global yang masuk melalui PFI diharapkan menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek strategis nasional dan sektor riil," ujarnya pekan lalu.

Antisipasi risiko

Namun, besarnya peluang tersebut juga diiringi risiko. Tidak kecil Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto. Sama-

rin, mengingatkan, pembentukan PFI harus disertai tata kelola yang kuat, pengawasan ketat, dan sistem mitigasi risiko yang memadai.

Pembentukan PFI berpotensi membuka ruang masuknya dana ilegal apabila desain kelembagaan dan pengawasannya tidak dirancang secara hati-hati. Terutama dengan rencana masuknya instrumen seperti *family office* dan layanan *private bank* aset global. *Family office* adalah entitas yang mengelola kekayaan keluarga ultrakaya, termasuk investasi lintas negara, perencanaan pajak, dan pengelolaan aset.

PFI lanjut Wijayanto, harus berisiko melindungi ekosistem perbankan yang di Indonesia apabila berbagai regulasi tidak ditutupi sejak awal. "Jika *family office* jadi dibentuk, ekosistem perbankan akan bergeser. Uang dari dalam dan luar negeri bisa masuk melalui *family office*, lalu dicuci ke bank lokal. Instrumen keuangan ini harus diantisipasi secara se-

ring," ujarnya.

Isi juga menyoroti risiko artifice regulasi. Dalam skema ini, pelaku usaha atau investor dapat memobilisasi aktivitas bisnis ke kawasan PFI untuk memanfaatkan insentif fiskal, kekomersialan aturan, atau rezim perpajakan yang lebih kompetitif dibanding pasar domestik. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi mengikis kontribusi industri keuangan dan mendorong pergeseran aktivitas dari sistem regulasi nasional ke kawasan dengan aturan khusus.

Nelain risiko tata kelola, PFI juga dinilai berpotensi mengubah struktur industri keuangan domestik. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Bank M. Rizal Fathakhsaban menilai, kehadiran pusat keuangan internasional ditambah skema *universal banking* yang diadopsi dalam revisi UU P2SK dapat memperbesar dominasi kelompok bank besar dan memicu konsentrasi pasar.



Menteri Keuangan Purbaya Yudhita Sadewa (kiri) menyerahkan berkas tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR P2SK Mahendra saat Rapat Paripurna Ke-22 DPR Masa Persidangan 1 Tahun Sadewa (2/7/2026). (Foto: Dwi Nugroho/Parlemen)

KontariAcademy

INTEGRATED COLLECTION STRATEGY
Perencanaan Pemasaran dan Bauran Masalah Secara Dini & Terintegrasi

Workshop *Integrated Collection Strategy* membekali para peserta dengan pemahaman mendalam tentang dinamika penjualan di lapangan, mulai dari trik dan tips penjualan yang efektif, strategi komunikasi dan negosiasi dengan berbagai tipe debitur, hingga batasan hukum yang wajib dikuasai. Semua dikuasai tuntas melalui teori, bedah kasus, dan sharing pengalaman dari praktisi.

Dr. Dr. Hadisaputro
Advokat, Kurator & Praktisi Penagihan

📍 bit.ly/KA-TSTP ☎️ 0813 111 6063

MASTERING PRODUCTION PLANNING INVENTORY CONTROL

Workshop ini dirancang untuk menjawab kebutuhan terhadap pemahaman *Sales and Operation Planning* (SSOP), *Master Production Schedule* (MPS), *Bill of Material* (BOM), *Available to Promise* (ATP), dan *Material Requirements Planning* (MRP).

Peserta akan dibekali dengan keterampilan praktis, dan alat yang diperlukan untuk mengelola produksi dan persediaan dengan efektif.

Efrata Denny, ST, MJS, M.Com, MAK, MMSCM
MIT Alumni, Affiliate

📍 bit.ly/KA-PPIC ☎️ 0813 111 6063

ENTERPRISE SELLING

Proses penjualan di segmen enterprise memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibanding penjualan pada umumnya. Sales perlu berhadapan dengan banyak pengambil keputusan, siklus penjualan yang panjang, serta kebutuhan bisnis yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis agar sales mampu membangun kredibilitas, memahami kebutuhan organisasi secara mendalam, dan meningkatkan peluang memenangkan transaksi bernilai besar.

Sandler

📍 bit.ly/KA-ES1 ☎️ 0821 2552 9550

15 JULI 2026
HOTEL SANTRA
S.P. JABAR
TICKET
RP 2.000.000

15 JULI 2026
HOTEL SANTRA
S.P. JABAR
TICKET
RP 3.000.000

16 JULI 2026
GD. KINERJA GRAMEDIA
JABAR
TICKET
RP 1.499.000
S.D 7 JULI 2026

📧 academy.kontari.co.id